

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Aktivitas dalam kegiatan pemerintahan tentunya tidak terlepas dari kehidupan politik yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Perlu dipahami bahwa kehidupan politik dikaji dari sosiologi politik pada dasarnya mengkaji masyarakat yang didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan politik. Hubungan dilihat dalam sisi saling pengaruh mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan politik seperti apa saja yang boleh dipolitikkan, bagaimana melakukannya, dan dimana politik boleh dilakukan. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari norma, etika, adat, dan hukum yang berkembang di masyarakat.

Sosiologi politik juga memfokuskan perhatiannya pada sikap dan perilaku politik masyarakat, terutama menyangkut persoalan tentang bagaimana masyarakat merespon terhadap suatu kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa. Misalnya, dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum semenjak reformasi politik.

Pemilihan umum 2019 merupakan penggabungan pemilihan legislatif dengan pemilihan eksekutif perdana yang diadakan secara serentak. Hal ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang

pemilu serentak, serta bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan Negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu. Dilansir melalui Neliti.com (<https://www.neliti.com/id/publications/55390/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-14puu-xi2013-berkaitan-dengan-pemilih>)

Berdasarkan pengamatan penulis dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sistem yang sangat mempengaruhi pemerintah baik ditingkat daerah maupun nasional. Karena mereka adalah sumber dari pemenuhan pokok bagi kebutuhan hidupnya politik dalam suatu Negara. Salah satu perilaku politik masyarakat ialah partisipasi politik dalam mendukung paslonnya. Dalam Negara demokrasi partisipasi politik ini merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.

Media sosial saat ini memiliki peranan yang penting bagi berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat *modern*. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya penggunaan media sosial sebagai alat untuk mempercepat proses perubahan sosial terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri media sosial dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kampanye politik, propaganda dan advertensi. Pengaruh kemajuan dan teknologi serta informasi terhadap politik, dapat dilihat dari komunikasi politik dan sosialisasi politik. Dimana, media menjadi agen penting komunikasi dan sosialisasi politik.

Dampak dari media sosial kaitnnya dengan politik tidak bisa dipandang remeh, seperti adanya *unfriend* dan *unfollow* terhadap teman di akun *instagram*

karena beda pilihan politik, saling menghujat antar pendukung, Penebaran berita *hoax* terkait capres 01 dan 02 juga merebak di media sosial seperti *instagram*, *facebook* dan lain sebagainya.

Media sosial seringkali dihebohkan dengan perang pilpres, netizen pendukung paslon saling serang di kolom komentar akun *Instagram* paslon 01 maupun 02. Hal ini terjadi ketika membela calon presiden yang diusung secara berlebihan, sehingga menghujat calon lain dengan menggunakan bahasa yang dianggap tidak sopan. Hal demikianlah yang terjadi di media sosial menjelang pemilihan Presiden 2019, bahkan sesudah pemilihan tepatnya pada tanggal 17 April 2019 lalu. Media sosial telah dijadikan kendaraan politik para pendukung calon Presiden dan calon wakil Presiden 01 maupun 02. Dukungan serta hujatan terposting secara berlebihan, membuat hawa media sosial tidak lagi terasa bersahabat. Fasilitas *unfriend*, *unfollow* dan *unshared* pun menjadi pilihan orang-orang yang gerah dengan hawa Pilpres yang panas di dunia maya.

Penebaran isu negatif yang menimbulkan disonansi yakni perasaan negatif terhadap orang yang menjelek-jelekan dan menebarkan isu terkait capres. Hal demikian dianggap sebagai realitas yang seringkali dijumpai di media sosial terutama *instagram*. Penyebab dari hal demikian karena media sosial memiliki kebebasan tanpa identitas. Bahkan, orang bisa menyembunyikan identitasnya. Sehingga seringkali kita jumpai di media sosial, bebas saling mencaci maki serta menghujat seenaknya saja karena identitasnya tersembunyi. Berdasarkan latar belakang masalah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian

tentang pola perilaku pendukung 01 dan 02 di Instagram pada pemilihan Presiden tahun 2019.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pola perilaku pendukung capres 01 dan 02 di Instagram?
2. Bagaimana dampak konten negatif yang disebar oleh kedua pendukung tersebut di Instagram?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui pola perilaku pendukung capres 01 dan 02 di Instagram
2. untuk menjelaskan dampak konten negatif di Instagram yang disebar oleh kedua pendukung tersebut

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Memberikan sumbangan terhadap sosiologi politik dan *social cyber* yang memfokuskan kepada pola perilaku pendukung capres 01 dan 02 di Instagram

2. Secara praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan peran media sosial yang digunakan untuk kepentingan politik dalam mendukung paslon serta penyebaran konten politik.

